

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Agency Theory

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Warsidi dan Pramuka, 2007).

Menurut Widyaningdyah (2001) *agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. *Agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin

meningkat terutama karena principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Teori agensi (*agency theory*) menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan pemilik modal (*principles*). Konflik tersebut timbul karena masing-masing pihak (*agent dan principles*) berusaha untuk mencapai tujuan yang saling bertentangan, yaitu berkaitan dengan pencapaian bonus manajemen.

2.2 Teori Stakeholder

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970an, yang secara umum dikenal dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. *Stakeholder theory* dimulai dengan asumsi bahwa nilai (*value*) secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. (Watiningsih, 2011).

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat

dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (*stakeholder*), namun lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan sebetulnya tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan *stakeholder*, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan atau klaim terhadap perusahaan (Watiningsih, 2011). Mereka adalah pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, investor, karyawan, kelompok politik, dan asosiasi perdagangan. Seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, *stakeholder* juga mempunyai hak terhadap perusahaan.

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang dimiliki *stakeholder* atas sumber tersebut. *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, “ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan

akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*” (Ghozali dan Chariri, 2007).

2.3 Laporan Keuangan

Keadaan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi stabil. Contoh faktor risiko: perusahaan mungkin memanipulasi laba ketika stabilitas keuangan atau profitabilitasnya terancam oleh kondisi ekonomi.

Menurut pedoman etika akuntan IAI, laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut Harahap (2011) menyatakan laporan keuangan (*financial statement*) merupakan media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Jika informasi ini disajikan dengan benar, informasi tersebut sangat berguna bagi siapa saja untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan tersebut.

Laporan keuangan terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba, dan laporan perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan yang

lainnya. Ada 3 macam laporan keuangan yang pokok dihasilkan yaitu neraca, laporan laba-rugi, dan laporan aliran kas.

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan, dengan membaca laporan keuangan dengan tepat, seseorang dapat melakukan tindakan ekonomi menyangkut lembaga perusahaan yang dilaporkan dan diharapkan akan menghasilkan keuntungan baginya.

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi keuangan selama satu tahun buku yang bersangkutan. Laporan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen yaitu, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai tujuan sebagai alat informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2011). Laporan keuangan sebuah perusahaan sangat banyak yang berkepentingan atas informasi yang disajikan, salah satunya adalah investor.

2.4 Corporate Governance

Corporate governance merupakan salah satu konsep yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah,

karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. *Organization for Economic Corporation and Development (OECD)* menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan cara-cara manajemen perusahaan (*para direktur*) bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham. *OECD* telah mengembangkan seperangkat prinsip *corporate governance* yang diterapkan sesuai dengan kondisi diberbagai negara.

Prinsip dasar tersebut adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), kewajaran (*Fairness*) dan tanggung jawab (*Responsibility*) yang mencakup lima aspek yaitu: perlindungan hak-hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham, peranan *stakeholder* dalam *corporate governance*, keterbukaan dan transparansi, dan peranan *Board of Director* dalam perusahaan. Keempat prinsip *corporate governance* diatas digunakan untuk mengukur seberapa jauh penerapan *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan transparansi yang berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung pada

kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan resiko yang dihadapi perusahaan. Praktik yang dikembangkan dalam rangka transparansi adalah perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, risiko-risiko yang dihadapi dan rencana atau kebijakan perusahaan (*corporate action*) yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada seluruh pihak mengenai struktur kepemilikan perusahaan, serta perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang dan hak kewajiban. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris, memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan pembatasan

kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Pengungkapan komisaris independen merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian oleh pemegang saham terhadap kinerja perusahaan.

3. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Praktik kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari praktik kecurangan (*Fraud*) dan praktik-praktik insider trading.

4. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab, Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam *corporate governance* yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Responsibilitas juga terkait dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi

semua peraturan dan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada akan menghindarkan dari sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi moral masyarakat akibat dilanggarnya kepentingan mereka.

Walaupun banyak pendapat tentang definisi dan tujuan *Corporate Governance*, namun demikian ada prinsip dasar yang berlaku universal. Sebagai gambaran, untuk berhasil di pasar yang bersaing, suatu perusahaan harus mempunyai pengelola perusahaan yang inovatif, yang bersedia untuk mengambil risiko yang wajar, dan yang senantiasa mengembangkan strategi baru untuk mengantisipasi situasi yang berubah-ubah (FCGI, 2002).

2.5 Manajemen Laba

Belum ada definisi tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan manajemen laba. Masing-masing peneliti memberikan definisinya. Manajemen laba dapat diartikan bermacam-macam, tergantung sudut pandang masing-masing. Scott (2006) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut “*Given that managers can choose accounting policies from a set (for example, GAAP), it is natural to expect that they will choose policies so as to maximize their own utility and/or the market value of the firm*”. Dari definisi tersebut manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Scott (2006) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku *opportunistik* manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak

utang, dan *political costs* (*Opportunistic Earnings Management*). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari prespektif *efficient contracting* (*Efficient Earnings Management*), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Dari sudut pandang etika, Schipper (1998) dalam Sutrisno (2002) menyatakan bahwa manajemen laba adalah suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut). Manajemen laba sebagai tindakan seorang manajer dengan menyajikan laporan yang menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa menimbulkan kenaikan (penurunan) profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka panjang. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Pada dasarnya manajer memmanage laba karena *earnings* atau laba telah dijadikan sebagai target dalam proses penilaian prestasi kerja departemen (manajer) secara

khusus dan perusahaan (organisasi) secara umum. Scott (2006:302) dalam Sulistyanto (2008) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba:

1. *Bonus Purposes*, manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara opportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan.
2. *Political Motivations*, manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.
3. *Taxation Motivation*, motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.
4. Pergantian *CEO*, *CEO* yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan berusaha memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.
5. *Initial Public Offering (IPO)*, manajer perusahaan akan melakukan *earnings management* agar harga sahamnya saat penawaran perdana (IPO) lebih tinggi, sedangkan kapitalisasi modal perusahaan menjadi lebih besar. Saat perusahaan *go public*, informasi keuangan yang ada dalam prospektus merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini dapat dipakai sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Untuk mempengaruhi keputusan calon investor maka manajer berusaha menaikkan laba yang dilaporkan.

Motivasi lain manajemen laba dilihat dari sudut pandang akuntansi adalah karena ada dua keterbatasan para pengguna dalam menginterpretasi pelaporan keuangan. Pertama, kriteria penyajian elemen pelaporan keuangan rentan terhadap kebijakan manajemen, yaitu pihak manajemen memiliki peluang dan kebebasan untuk menerapkan kebijakan manajemen yang berhubungan dengan pencatatan dan metode akuntansi yang akan digunakan untuk pelaporan keuangannya. Kedua, tidak ada observasi sempurna mengingat tidak semua kebijakan manajemen dapat diobservasi oleh para pengguna laporan keuangan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara investor dengan manajemen perusahaan yang berpeluang untuk melakukan manipulasi laba sehingga mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan ke publik.

2.6 Leverage

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan tingkat asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio total hutang terhadap total aset, rasio *times interest earned*, dan rasio *fixed charges coverage*.

1. Rasio total hutang terhadap aset menghitung seberapa jauh dana disediakan oleh kreditur. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan *leverage* keuangan (*financial leverage*) yang tinggi. Penggunaan *financial leverage* yang tinggi akan meningkatkan rentabilitas modal saham (*return on equity*

atau ROE) dengan cepat, tetapi sebaliknya apabila penjualan menurun, rentabilitas modal saham (ROE) akan menurun cepat pula. Risiko perusahaan dengan *financial leverage* yang tinggi akan semakin besar pula.

2. Rasio *times interest earned* menghitung seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga. Rasio yang tinggi menunjukkan situasi yang aman, meskipun barangkali juga menunjukkan terlalu rendahnya penggunaan hutang (penggunaan *financial leverage*) perusahaan. sebaliknya, rasio yang rendah memerlukan perhatian dari pihak manajemen.
3. Rasio *fixed charge coverage* menghitung kemampuan perusahaan membayar beban tetap total, termasuk biaya sewa. Memperhitungkan sewa karena meskipun sewa bukan hutang tetapi sewa merupakan beban tetap dan mengurangi kemampuan hutang perusahaan, beban tetap tersebut mempunyai efek yang sama dengan beban bunga.

2.7 Kualitas Audit

Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu independensi auditor. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor (Febrianto, 2009). Klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh

klien. Manapun di antara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan ke mana klien tersebut akan berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien.

Sebaliknya, ketika pergantian auditor terjadi karena peraturan yang membatasi masa perikatan auditnya, seperti yang terjadi di Indonesia, maka perhatian utama beralih kepada auditor pengganti, tidak lagi kepada klien. Pada pergantian secara wajib, yang terjadi adalah pemisahan paksa oleh peraturan. Peraturan-peraturan pada kewajiban rotasi auditor merupakan peraturan yang mengatur tentang pembatasan audit yaitu *audit tenure* dan *auditor switching* sekarang ini di Indonesia. Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.01/2008 pasal 3 dapat disimpulkan bahwa tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang lain.

2.8 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan Tahun	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1.	Pranata Puspita Midastuty dan Mas'ud Machfoedz (2003)	Analisis Hubungan mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Indikasi Manajemen Laba	Variabel independen: 1. Kepemilikan manajerial 2. Kepemilikan institusional 3. Karakteristik dewan direksi Variabel dependen: 1. Manajemen laba 2. Kualitas laba	Mekanisme <i>corporate governance</i> mempengaruhi manajemen laba : 1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba 3. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba
2.	Deni Darmawati (2003)	<i>Corporate Governance</i> dan Manajemen Laba	Variabel independen: 1. Kepemilikan institusional 2. Kepemilikan manajerial 3. Dewan direksi 4. Transparansi & Akuntabilitas Variabel kontrol : 1. Profitabilitas 2. Leverage Variabel dependen: 1. Manajemen laba	1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba 3. Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 4. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba 5. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba 6. Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba

3.	Eddy Suranta dan Pratana Puspa Midiastuty (2005)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Praktik Manajemen Laba	<p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit 2. Komisaris Independen 3. Ukuran Dewan Direksi 4. Kepemilikan Institusional 5. Kepemilikan Manajerial <p>Variabel dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen laba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 2. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 3. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba 4. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 5. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
----	--	---	--	--

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Kepemilikan Institusional terhadap manajemen laba

Investor institusional diduga lebih mampu untuk mencegah terjadinya manajemen laba, dibanding dengan investor individual. Investor institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba. Secara singkat dapat dikatakan bahwa antara kepemilikan institusional dengan manajemen laba mempunyai hubungan negatif. Dimana semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh korporasi maka semakin kecil kemungkinan terjadinya manajemen laba. Jiambalvo dkk (1996) menemukan bahwa nilai absolute akrual diskresioner berhubungan negatif dengan kepemilikan investor institusional. Midiastuty & Machfoedz (2003) juga menemukan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk

melakukan pengelolaan laba. Tetapi Darmawati (2003) tidak menemukan bukti adanya hubungan antara pengelolaan laba dengan kepemilikan institusional.

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba

2.9.2 Proporsi Komisaris Independen terhadap manajemen laba

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota dewan komisaris independen harus bertindak berdasarkan informasi yang jelas, dengan itikad yang baik, berdasarkan kehati-hatian, serta demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Subprinsip ini menyatakan dua elemen penting dari tanggung jawab pengelolaan dewan, yaitu kewajiban kehati-hatian dan kewajiban kesetiaan. Oleh karena itu, terhadap manajemen laba, merupakan alat yang sangat berguna bagi terutama komisaris independen dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengembalian keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. *Board of directors* yang didominasi oleh komisaris independen akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas, sehingga mereka akan cenderung menghindari manajemen laba, di lain pihak, *board of directors* yang didominasi oleh pihak internal atau *board of directors* yang memiliki komisaris independen yang rendah akan memberikan kesempatan lebih besar manajer untuk melakukan manajemen laba secara bebas.

H2: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba

2.9.3 Ukuran Dewan Direksi terhadap manajemen laba

Manajer atau dewan direksi dapat melakukan *earnings management* untuk membingungkan pemilik atau pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan melihat dari laporan keuangan perusahaan, dimana pemilik atau pemegang saham akan sulit mengetahui yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan melalui data atau angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan. Dewan direksi memegang peranan sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan direksi. Fungsi direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris untuk melakukan pengelolaan perusahaan dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Hasil penelitian Midiastuty & Machfoedz (2003) membuktikan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

H3: Ukuran dewan direksi berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba

2.9.4 Ukuran Komite Audit terhadap manajemen laba

Komite audit memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit bekerja sama dengan pihak yang berkaitan dengan fungsi internal audit dan staf keuangan perusahaan. Komite audit akan melakukan *review* terhadap laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan pengungkapan dan isi yang telah diaudit oleh akuntan publik, melakukan *review* mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi, hal-hal serta penilaian signifikan lainnya

yang terdapat pada laporan keuangan, independensi dan obyektifitas dari akuntan publik. Hubungan agensi akan terjadi jika *principal* mempekerjakan orang lain, dalam hal ini agen untuk melaksanakan pekerjaan yang telah didelegasikan oleh *principal*. Hubungan agensi dapat menimbulkan beberapa permasalahan karena terjadinya asimetri informasi antara *principal* dan agen. Asimetri informasi inilah yang dapat menjadi celah terjadinya *fraud*. Untuk mencegah terjadinya *fraud*, dibutuhkan pihak lain yakni komite audit independen. Komite audit sebaiknya memiliki keahlian dalam keuangan. Hal ini dikarenakan keahlian keuangan itulah yang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Jambalvo *et al*, (1996) menulis bahwa komite audit dipandang sebagai mekanisme pemantauan yang secara sukarela bekerja dalam situasi keagenan tinggi untuk meningkatkan kualitas arus informasi.

H4: Ukuran komite audit berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba

2.9.5 Leverage terhadap manajemen laba

Leverage merupakan seberapa besar pinjaman yang atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage*, maka perusahaan akan cenderung melaporkan *profitabilitas* yang tinggi pula. Disamping itu, semakin tinggi tingkat *leverage* semakin besar kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan laba yang tinggi pula. Hal inilah yang dapat mendorong terjadinya manipulasi laba pada laporan keuangan. Harjitodan Martono (2005) berpendapat bahwa terdapat potensi untuk mentransfer kekayaan dari *debtholders* kepada pemegang saham

dan manajer pada perusahaan yang memiliki tingkat ketergantungan hutang yang tinggi. *Leverage* merupakan proksi kecenderungan perusahaan untuk melanggar perjanjian kredit.

H5: Leverage berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba

2.9.6 Kualitas Audit terhadap manajemen laba

Kualitas audit dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran KAP, ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan Big 4, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional diatas orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big 4, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang.

KAP yang besar lebih independen dibandingkan dengan KAP yang kecil. Dengan alasan bahwa ketika KAP besar kehilangan satu klien tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatannya. Akan tetapi jika KAP kecil kehilangan satu klien sangat berarti karena kliennya sedikit (Febrianto, 2009). Sehingga KAP besar seperti Big 4 biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan independensi auditor daripada KAP kecil. Selain itu, perusahaan audit yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit tinggi dan memiliki reputasi tinggi di lingkungan bisnis (Naftalia, 2013).

H6: Kualitas Audit berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba

2.10 Kerangka Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menguji mekanisme *corporate governance* seperti, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Penelitian ini menambahkan variabel *leverage* dan kualitas audit sebagai variabel control dengan alasan hutang dapat meningkatkan manajemen laba saat perusahaan ingin mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian hutang dan meningkatkan posisi tawar perusahaan selama negosiasi hutang. Selain itu, kualitas audit pun tak luput mempengaruhi manajemen laba. Kualitas audit merupakan salah satu indikator yang bisa menekan praktik manajemen laba. Ketika laporan keuangan perusahaan di audit oleh pihak yang memiliki reputasi serta pengalaman yang banyak secara tidak langsung laporan atau hasil audit yang disajikan memiliki kualitas yang baik. Berikut kerangka pikir penelitian ini.

Gambar 2.1 Model Penelitian

